



► PROGRAM KEBERSIHAN

Desentralisasi Sampah Harus Segera Dieksekusi

DANUREJAN—Pemda DIY mengingatkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/ kota di wilayahnya untuk segera mengeksekusi program desentralisasi sampah di wilayah masing-masing.

Yosef Leon Plinsker
yosef@harianjogja.com

Program yang dulunya hanya diperuntukkan bagi Kota Jogja, Kabupaten Sleman dan Bantul itu kini menyasar seluruh kabupaten termasuk Kulonprogo dan Gunungkidul.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Benny. Suharsono mengatakan Gunungkidul dan Kulonprogo sudah lebih awal melaksanakan program desentralisasi sampah. Selanjutnya, ada Sleman yang dalam waktu dekat akan mendeklarasi pengolahan sampah untuk bahan baku pengganti batu bara. Sementara, Bantul selain pengolahan dari kalurahan ada TPS 3R. "Kami minta program ini diakselerasi paling lambat di triwulan kedua

► Paling lambat triwulan kedua 2024, pemerintah daerah harus bisa mengatasi sampahnya sendiri.

► TPST Piyungan Transisi 2 mampu menampung sampah dari Jogja, Bantul dan Sleman maksimal sampai April 2024.

2024, pemerintah daerah harus bisa mengatasi sampahnya sendiri," kata Beny, Rabu (3/1).

Menurut Beny, saat ini hanya tinggal Kota Jogja yang perlu didampingi secara berkelanjutan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayahnya. Beny berharap agar sejumlah TPS yang sudah direncanakan sejak dulu untuk mendukung pengelolaan sampah bisa segera dioperasikan yakni TPS Karangmiri dan TPS Nitikan. "Harapannya, progres triwulan kedua bisa teratasi. Karena TPST Piyungan transisi 2 dengan tonase dibatasi seperti sekarang akan mampu maksimal menampung sampah Jogja, Bantul dan Sleman sampai dengan April 2024," kata Beny.

Sampai sekarang, kuota pembuangan sampah ke TPST Piyungan terus dikurangi oleh Pemda DIY. "Awal sampai pertengahan Desember 2023, kuota masih cukup

tinggi. Kita kurangi misalnya dari 150 ton ke 135 ton. Otomatis sisanya harus diolah sendiri. Kalau dilepas sampai 850 ton per hari enggak sampai April TPST Piyungan transisi 2 sudah tutup," katanya.

Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk fokus penyelesaian sampah di sektor hulu. Apalagi di masa libur panjang akhir tahun kenaikan volume sampah naik sampai 20%. Dengan perkiraan masa pakai TPST Piyungan yang tak lama lagi, maka penyelesaian masalah sampah harus dilakukan dengan maksimal dan dalam waktu dekat. "Kuncinya ada di wilayah dengan desentralisasi mandiri pengelolaan sampah. Kalau pemerintah kabupaten/ kota sudah tak lagi membuang sampah ke Piyungan, maka kita diskusikan lagi untuk penataannya," kata Kusno.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005